

ABSTRAK

ISMAWATI, 2023. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Pada Warung Makan di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Nurul Adliyah

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi tentang implementasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) pada warung makan di Kota Palopo dan mengevaluasi aspek hukum atau tinjauan yuridis terhadap implementasi pajak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kategori deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, (1). Implementasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada warung makan di Kota Palopo dilakukan dengan menggunakan sistem self assessment, di mana pemilik warung makan diberi kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besaran tarif pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palopo sebesar 10%. Dalam pelaksanaan penyetoran pajaknya, pihak rumah makan setiap tanggal 1 harus datang ke BPPRD untuk melakukan pembayaran. Dalam mekanisme pemungutan pajak ini, petugas pajak di dinas pendapatan daerah hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dilakukan dengan cara bedah wajib pajak, yaitu dengan memotret kondisi wajib pajak yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dengan adanya sistem self assessment ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik warung makan dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, diperlukan pengawasan yang ketat dari Dinas Pendapatan Daerah agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan efektif dan efisien (2). Pajak rumah makan di Kota Palopo diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak di daerah termasuk di Kota Palopo. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, yang mengatur pengenaan pajak restoran di Kota Palopo. Peraturan Walikota Palopo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, yang mengatur prosedur pemungutan pajak restoran di Kota Palopo. Peraturan Walikota Palopo Nomor 30 Tahun 2013 tentang Besarnya Tarif Pajak Restoran, yang mengatur tarif pajak restoran yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah makan di Kota Palopo. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang implementasi dan aspek hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

pada warung makan di Kota Palopo, dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pengenaan pajak yang ada.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Implementasi, Pajak Pertambahan Nilai, Warung Makan



ABSTRACT

ISMAWATI, 2023. *"Juridical Review of the Implementation of Regional Taxes and Regional Retribution (PDRD) at Food Stalls in Palopo City". Thesis for the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Nurul Adliyah*

This study aims to gather information about the implementation of Regional Taxes and Regional Retribution (PDRD) in food stalls in Palopo City and to evaluate the legal aspects or juridical review of the implementation of these taxes. The research method used was field research in the qualitative descriptive category with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Based on the results of the research and discussion conducted, it can be concluded that, (1). The implementation of Regional Taxes and Regional Retribution (PDRD) for food stalls in Palopo City is carried out using a self-assessment system, in which food stall owners are given the authority to calculate, calculate, pay, and report their own taxes owed. The tax rate set by the Municipal Government of Palopo is 10%. In implementing the tax deposit, the restaurant must come to the BPPRD every 1st of the month to make payments. In this tax collection mechanism, the tax officer at the regional revenue service is only tasked with supervising the implementation of the fulfillment of tax obligations by taxpayers. The supervision system carried out by the Regional Revenue Service is carried out by way of reviewing the taxpayer, namely by photographing the actual condition of the taxpayer in accordance with the reality on the ground. With this self-assessment system, it is hoped that it can increase the awareness of food stall owners in paying taxes in a timely manner and in accordance with applicable regulations. Even so, strict supervision is needed from the Regional Revenue Service so that the implementation of tax collection can run effectively and efficiently (2). Restaurant taxes in Palopo City are regulated by several laws and regulations which form a juridical basis, namely Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, which is the legal basis for imposing taxes in the regions, including in Palopo City. Palopo City Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Restaurant Tax, which regulates the imposition of restaurant taxes in Palopo City. Palopo Mayor Regulation Number 19 of 2011 concerning Procedures for Collection of Restaurant Tax, which regulates the procedure for collecting restaurant tax in Palopo City. Palopo Mayor Regulation Number 30 of 2013 concerning the Amount of Restaurant Tax Rates, which regulates the restaurant tax rates that must be paid by restaurant owners in Palopo City. Thus, the results of this study provide an overview of the implementation and legal aspects of Value Added Tax (VAT) at food stalls in Palopo City, and can be used as evaluation material for related parties in improving and improving the existing tax imposition system.

Keywords: *Juridical Review, Implementation, Value Added Tax, Food Stalls*